

IMPLEMENTASI PROGRAM *DOUBLE TRACK* DALAM MENINGKATKAN  
KOMPETENSI SISWA  
(Studi Kasus Di SMAN 1 Bluto Sumenep)

*IMPLEMENTATION PROGRAMS DOUBLE TRACK IN INCREASE STUDENT  
INTEREST*  
(Case study At SMAN 1 Bluto Sumenep)

Oleh  
Ahmawati<sup>1</sup>  
Rillia Aisyah Haris<sup>2</sup>, Nur Inna Alfiah<sup>3</sup>  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja

**ABSTRAK**

Implementasi Program *Double Track* yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep dalam meningkatkan kompetensi siswa untuk pelatihan dan keterampilan telah terlaksana dengan tepat dan baik serta memenuhi sasaran siswa yang ikut program dengan tidak melanjutkan kuliah serta ada berkeinginan membantu orang tua dalam menambah pendapatan keluarga dan hal lain yang ada pada diri siswa dalam keluarganya, yaitu 1) Standar pelatihan dan tujuan kebijakan (*Policy standars objecties*) dalam menerapkan program *Double Track* yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep, telah dilaksanakan secara baik dengan standar keterampilan yang ada yaitu tata boga, tata rias, tata busana dan TKR.

**ABSTRACT**

*Program Double Track one that executed SMAN 1 Bluto Sumenep in increase student interest for training and skill was performed on the nose and well and student target pock that following program with doesn't drawn out college and there is wishful help oldster in add family income and aughts other thing on self student in its family, which is 1) Default training and to the effect policy ( Policy standars objecties) in applies program Double Track one that executed SMAN 1 Bluto Sumenep, was performed one good manners with standard skill whatever available which is manner boga, manner makes-up, dressmaking and TKR, 2 ) Sumberdaya policies( Policy Resources ) one that is at SMAN 1 Bluto Mengimplementasikan double track very good, where is this activity as ekstrakuler up to 4 months full for student to braze specialized final for student what do don't want to drawn out college*

**Key word** : ***Implementation, Student interest and Double Track***

## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu bekal berharga dalam proses pembentukan kualitas sumber daya manusia dalam rangka pembangunan bangsa. Kualitas suatu pendidikan tidak biasa hanya diukur dengan fasilitas semata, tetapi diukur melalui seberapa besar alumni pendidikan tersebut berperan dalam bidangnya. Mutu pendidikan pada era globalisasi menjadi salah satu perubahan keberhasilan dari suatu lembaga. Meningkatnya permintaan konsumen terhadap dunia pendidikan yang sangat tinggi, maka lembaga pendidikan berusaha berlomba-lomba dalam memenuhi hasrat dari konsumennya tersebut. Sumber daya manusia dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan di setiap instansi maupun lembaga pendidikan sekalipun. Sumber daya manusia yang dimaksud di antaranya adalah tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (tata usaha).

Pemenuhan pendidikan yang bermutu menjadi hak yang sama bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Pendidikan bermutu harus diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendidik, dan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan. Menjadi komitmen bagi pendidik secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Serta peran masyarakat dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi

perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. (Maula, 2021)

Permasalahan banyaknya siswa SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi karena berbagai faktor ini, dapat menyebabkan jumlah angkatan kerja meningkat dan memicu peningkatan angka pengangguran di Indonesia. Pengangguran merupakan suatu kondisi seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja namun belum memperoleh pekerjaan. Sementara itu, data sebesar 7,95 persen merupakan angka pengangguran dari lulusan tingkat SMA. Berdasarkan data di atas dapat diasumsikan bahwa lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan belum mendapatkan pekerjaan, turut menyumbang angka pengangguran menjadi semakin tinggi. Salah satu penyebabnya lantaran selama proses pembelajaran, sehingga kesiapan memasuki dunia kerja masih rendah. (Tempo.CO.Berita Fakta.<https://nasional.tempo.co>>red>lulusan-SMA).

Oleh sebab itu, sekolah jenjang SMA dengan lulusan yang banyak tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan keterampilan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkompeten. Harapannya hal ini dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah pengangguran di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kompetensi dalam bidang yang spesifik, sehingga para siswa lebih siap dan terampil terjun di dunia kerja secara mandiri.

Kompetensi lulusan merupakan standar yang harus dicapai sekolah dalam menghasilkan *output* berkualitas sesuai dengan keahlian

yang dibutuhkan lapangan kerja. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kompetensi lulusan SMA adalah dengan menerapkan program *double track* sejak tahun 2018. Permasalahan yang mendasari munculnya program ini yakni masih banyak lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi yang menyebabkan pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan. Program *double track* merupakan sebuah istilah yang diberikan pada sekolah yang mengadakan dua program pendidikan yaitu formal dan keterampilan wirausaha. *Double track* menjadi sebuah solusi dalam menciptakan lulusan SMA dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang dibekali keterampilan tambahan guna memasuki dunia kerja. (Dinas Pendidikan Jawa Timur, 2018).

Kebijakan program *double track* ini salah satunya bisa dilihat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 Tahun 2018 tentang Program *Double Track* Pada Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur. Peraturan tersebut dibuat sehubungan dengan masih banyaknya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan juga untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Menurut peraturan Gubernur tersebut pada pasal 1 ayat (6) berbunyi *Double Track* adalah istilah yang diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan dua program pendidikan, yaitu pendidikan formal dan program keterampilan kewirausahaan. Selanjutnya pada pasal 3 disebutkan mengenai ruang lingkup penyelenggaraan program *double track* yang meliputi: (a) pemetaan peserta didik dan pemetaan sekolah;

(b) materi pelatihan dan pengembangan program; (c) pendidik, tenaga pelatih (instruktur), sarana dan prasarana; (d) sertifikasi; dan (e) pembiayaan.

Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Program *Double Track* sejak Tahun 2018. Kabupaten Sumenep mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan program *double track* sebanyak 6 sekolah yaitu SMAN 2 Sumenep, SMAN Bluto, SMAN Gapura, SMAN Lenteng dan SMAN Ambunten serta SMAN Masalembu.

Salah satu SMA di Kabupaten Sumenep yang telah menyelenggarakan program *double track* selama 3 tahun adalah SMA Negeri 1 Bluto dengan 2 (dua) keterampilan, yaitu tata busana dan teknik kendaraan ringan, dengan rincian 3 rombongan belajar untuk tata busana dan 1 rombongan belajar teknik kendaraan ringan, berikut dengan trainer setiap bidang keterampilan. Sedangkan guru pembimbing yang sebelum melaksanakan kegiatan *double track*, para trainer tersebut mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan dalam penelitian ini, adalah Bagaimana Implementasi Program *Double Track* Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Siswa Menuju Ekonomi Kreatif Di SMAN 1 Bluto Kabupaten Sumenep? Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, adalah Untuk Mengetahui Implementasi Program *Double Track* Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan Siswa Menuju Ekonomi Kreatif Di SMAN 1 Bluto Kabupaten Sumenep.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi publik, adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sedangkan Keban menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2016: 4).

Islamy (2016 : 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Definisi tersebut diatas menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai - nilai.

Soebarsono (2017 : 55) menuliskan bahwa kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan yang akan dicapai. Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
2. Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.
5. Lingkungan sekitarnya.

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoritas atau demokratis.

Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. (Dwijowijoto, 2016 : 70).

Meter dan Horn dalam Sujianto (2018 : 35) mengatakan, bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator - indikator hasil kerja merupakan hal yang

penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai, sejauh mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

2. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

3. Aktivitas

Pengamatan dan Komunikasi Inter organisasional (*Interorganizational Communication and enforcement Activities*) Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu - individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi. Komunikasi antara organisasi merupakan hal yang kompleks. Penyampaian informasi kebawah pada suatu organisasi atau organisasi yang satu ke organisasi yang lain, mau atau tidak komunikator baik secara sengaja atau tidak. Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institusional di mana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

4. Karakteristik Pelaksana (*The Charactrristics of the Implementing Agencies*). Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan, lebih jelasnya karakteristik berhubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan – keputusan sub unit dalam proses implementasi. Sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

5. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik  
Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (Ekosospol). Pengaruh Eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian. Tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dapat diambil dari berbagai pandangan antara lain (Soebarsono, 2016: 89):

- 1) Komunikasi  
Komunikasi sebagai sarana untuk mentransmisikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- 2) Sumberdaya  
Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas dokumen saja. Implementasi tidak akan berjalan efektif apabila kekurangan sumberdaya untuk melaksanakannya.

- 3) Disposisi  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.

- 4) Struktur Birokrasi  
Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Kompetensi dalam sebuah cakupan yang luas dapat juga dideskripsikan sebagai suatu karakteristik yang mendasari individu yang berkaitan erat dengan sebuah kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaannya dimana didalamnya mencakup motivasi, sifat dan sikap, konsep diri, pengetahuan dan perilaku atau keterampilan.

Kompetensi adalah suatu karakteristik dasar individu yang memiliki suatu hubungan yang kausal atau hubungan sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan atau standar, efektif, atau berpenampilan superior di tempat kerja pada situasi tertentu (Efendi, 2017 : 84).

Wibowo (2017:121) mengatakan Kompetensi dapat dipilah-pilah menurut stratanya, kompetensi dapat dibagi menjadi :

1. *Core competencies*  
merupakan kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi harus dimiliki semua karyawan dalam organisasi.

2. *Managerial competencies* merupakan kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu.
3. *Functional competencies* merupakan kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Fokus penelitian ini implementasi program *Double Track* didasarkan pendapat Sujianto (2018 : 35) mengenai implementasi kebijakan meliputi:

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan (*Policy standards objecties*)  
Standar pelatihan yang diberikan sebagai -faktor yang menentukan hasil kerja siswa SMAN 1 Bluto dalam menerapkan program *Double Track* setelah lulus, sehingga dimasyarakat mampu untuk bekerja dari hasil pelatihan program *double track*.
- b. Sumberdaya Kebijakan (*Policy Resources*)  
Sumberdaya dan kemampuan siswa SMAN 1 Bluto dalam memudahkan dalam bekerja, bila tidak akan melanjutkan sekolah dengan menerapkan *double track*, agar bisa mandiri dalam kehidupannya dalam menumbuhkan kerja

hasil program *double track* yang telah diikutinya.

- c. Aktivitas Standar dan tujuan program *double track* dipahami oleh siswa dalam menjalankan program *double track* agar implementasi tercapai bila tidak melanjutkan kuliah dan langsung bekerja.
- d. Karakteristik Pelaksana  
Karakteristik pelaksana menunjukkan adanya norma dan pola hubungan tidak terlepas dari siswa untuk bisa menerapkan *double track* yang bisa mandiri.

Sumber data dalam penelitian kualitatif dengan mempergunakan pada dua sumber, yaitu :

1. Data Primer  
Data yang diperoleh secara langsung dari SMAN Bluto. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru dan Siswa.
2. Data sekunder  
Data yang didapatkan dari pihak lain yang sudah tersedia sebelum penelitian diadakan serta data penunjang dalam penelitian, sehingga data ini sebagai penunjang dari data primer.

Subjek penelitian didasarkan pada "*social situation*" dari implementasi kebijakan, adalah : Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka subjek dalam penelitian ini sebanyak :

1. Informan Kunci  
: Kepala Sekolah SMAN 1 Bluto

2. Informan Utama  
: Siswa Kelas XI
3. Informan Pendukung  
: Guru Trainer *Double Track*

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*data reduction*)  
Proses pemilihan, pemusatan perhatian serta penyederhanaan, pengabstrakan dan program *Double Track* yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, dengan cara menajamkan permasalahan yang ada, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data yang akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi oleh peneliti.
2. Penyajian Data (*Data Display*)  
Penyajian data peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan program *Double Track* di SMAN 1 Bluto.
3. Penarikan Kesimpulan (*concluting drawing*).  
Penarikan kesimpulan, suatu kegiatan dari kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk mengetahui hasil suatu penelitian dan kesimpulan juga diverifikasi selama kegiatan penelitian berlangsung.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan implemenetasi Program *Double Track* yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep

dalam meningkatkan kompetensi siswa untuk pelatihan dan keterampilan telah terlaksana dengan tepat sasaran dan waktu, dimana siswa yang ikut program tersebut telah mempunyai rencana untuk tidak melanjutkan kuliah, membantu orang tua dalam menambah pendapatan keluarga dan hal lain yang ada pada diri siswa dalam keluarganya.

Kebijakan pendidikan berbasis *double track* merupakan inisiatif yang timbul secara sosio-kultural yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam rangka merespon kondisi yang ada terutama bagi sekolah menengah atas yang ada dipinggiran kota, sehingga hadirnya *double track* sangat tepat dikembangkan pada sekolah ini.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 139 tahun 2018, *Double Track* adalah istilah yang diberikan kepada sekolah yang menyelenggarakan dua program pendidikan, yaitu pendidikan formal dan program pendidikan kewirausahaan.

#### **1 Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy standars objecties)**

Standar pelatihan dan tujuan kebijakan dalam menerapkan program *Double Track* yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep, telah dilaksanakan secara baik dengan standar keterampilan yang ada yaitu tata boga, tata rias, tata busana dan TKR diberikan pada siswa semester akhir dan dikhususkan bagi siswa yang tidak melanjutkan kuliah atau mau langsung kerja sendiri.

Tujuan kebijakan ini untuk mempermudah siswa untuk bisa bekerja sendiri setelah lulus sekolah, termasuk siswa telah mempunyai keahlian sesuai bidangnya, sehingga lulus sekolah telah mempunyai

pandangan untuk melanjutkan keterampilan yang sudah ada di bangku sekolah melalui Program *Double Track*.

SMAN 1 Bluto ini sebagai sekolah penggerak tentunya melaksanakan program Jawa Timur yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur dengan Program *Double Track*, yang bertujuan siswa pada saat sekolah di lanjutan atas ini dilatih dan diberi keterampilan, karena SMAN 1 Bluto termasuk sekolah menengah atas yang posisinya berada di pinggiran, maka diterapkan program tersebut, karena nantinya siswa yang tidak melanjutkan bisa langsung bekerja.

*Double track* ini sebagai bentuk implementasi kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilaksanakan bagi sekolah menengah atas. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. (Syaukani, 2017 : 295).

Program *Double Track* yang telah diterapkan di SMAN 1 Bluto ini sebagai bentuk implementasi dari program Jawa Timur, untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kerja bagi siswa yang ingin bekerja setelah lulus atau siswa yang tidak melanjutkan kuliah karena berbagai hal, sehingga siswa dapat memanfaatkan keahliannya yang telah ikut Program *Double Track*.

Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian Azka Maziyyah Ridhwanah (2022), menunjukkan manajemen program *double track* dimulai dari perencanaan yakni penentuan program pelatihan melalui angket yang diberikan kepada siswa kelas XI, pemilihan *trainer* sesuai

dengan kompetensi yang dimiliki guru dan penjadwalan pelaksanaan kegiatan, faktor pendukung kegiatan *double track* berupa antusiasme dari siswa dalam mengikuti program *double track*, sedangkan faktor penghambatnya adalah adanya kebijakan pembelajaran daring selama pandemi yang menyebabkan kegiatan *double track* tidak dapat berjalan secara maksimal; Program *double track* yaitu meningkatnya kompetensi siswa SMAN 1 Jenangan sesuai dengan program yang dipilihnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sebagian siswa yang memiliki usaha secara mandiri.

*Double Track* adalah suatu sistem pembelajaran yang menggabungkan cara belajar SMA yang diberi keterampilan tambahan. Jadi program *Double Track* dirumuskan sebagai SMA yang menjalankan kegiatan belajar-mengajar reguler dan menyelenggarakan kegiatan pembekalan keterampilan secara berdampingan dengan memanfaatkan kearifan lokal, mengambil kegiatan ekstrakurikuler yang pelaksanaannya diluar jam sekolah.

Program *Double Track* yang telah diimplementasikan di SMAN 1 Bluto Sumenep dengan maksud dan tujuan siswa yang tidak melanjutkan kuliah atau hal lain maka dapat menerapkan *double track* yang telah diikuti waktu sekolah, terlihat *Double Track* yang di SMAN 1 Bluto, sangat tepat dan memenuhi sasaran karena dari jumlah siswa yang ada separuhnya tidak ingin melanjutkan kuliah, menginginkan langsung bekerja.

## **2 Sumberdaya Kebijakan (Policy Resources)**

Sumberdaya kebijakan SMAN 1 Bluto mengimplementasikan *double*

*track*, sangat baik, dimana kegiatan ini sebagai ekstrakurikuler selama 4 bulan penuh bagi siswa kelas akhir yang dikhususkan bagi siswa yang tidak ingin melanjutkan kuliah atau siswa lulus langsung bekerja sendiri, sehingga kebijakan *double track* ini disesuaikan dengan kemampuan siswa yang nantinya siswa bisa mandiri dalam kehidupannya dalam menumbuhkan dirinya berkembang dalam berwirausaha mandiri.

Kebijakan program *double track* yang ada di SMAN 1 Bluto disesuaikan dengan kemampuan siswa, artinya siswa sesuai keinginan dan kemampuannya bisa memilih dengan apa yang akan diikuti, karena nantinya *double track* ini akan dipakai setelah lulus SMA, dan guru trainer tidak akan mendampingi kembali, sehingga dalam pemilihan pelatihan harus benar-benar dengan keinginan dan ketrampilan yang ada pada dirinya, sehingga nantinya bisa dikerjakan dan menghasilkan pendapatan bagi dirinya.

*Double Track* pada sekolah ini dalam pengelolaannya sangat tepat dan baik, dimana pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Hasibuan pengelolaan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. (Naway, 2016, 112).

Kebijakan yang diterapkan *Double Track* bagi siswa, telah disesuaikan potensi yang ada pada dirinya siswa, karena *double track*

ini bertujuan untuk memberikan ilmu dalam berwirausaha setelah lulus SMA dan yang berkeinginan langsung bekerja. Maka dengan sendirinya *double track* yang pernah diikuti akan diterapkan pada yang sesungguhnya di masyarakat.

Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian Nur Kholis (2022), menunjukkan Implementasi program Double Track di SMA NU 1 Gresik sudah berjalan dengan baik. Itu dibuktikan dengan pembentukan tim kerja yang masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi, yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, koordinator pelaksana program double track dan para guru. Dalam mengikuti program Double Track, terdapat alur yang harus diikuti oleh peserta didik yaitu pemetaan peserta didik, pembekalan secara teori, praktek pembuatan produk atau karya dan mengikuti ujian sertifikasi. Pelaksanaan program double track perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak seperti, mitra dunia usaha (UMKM) dan industri, lembaga pelatihan ISI Surakarta, Airlangga Broadcasting dan mitra lainnya. SMA NU 1 Gresik telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung program *Double Track* seperti studio foto, video, sinematografi, studio grafis, studio musik dan orkestra, koperasi Nusamart, foodcourt, ruang seni, dan ruang siaran radio.

*Double track* menjadi sebuah solusi dalam menciptakan lulusan SMA dengan sumber daya manusia yang berkualitas yang dibekali keterampilan tambahan guna memasuki dunia kerja. *Double track* bertujuan untuk membekali para peserta didik yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi agar mempunyai

keterampilan berwirausaha. Adapun peserta didik yang dilibatkan dalam program tersebut adalah kelas XI. Pemilihan program pelatihan ini disesuaikan dengan minat siswa.

Kebijakan Program *Double Track* yang diberikan kepada siswa SMAN 1 Bluto, dengan diberikan kebebasan siswa untuk memilih keterampilan yang diinginkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, karena SDM siswa akan mempengaruhi jalannya keterampilan, dengan SDM yang tinggi dan memadai, maka program *Double Track* akan membuahkan hasil yang baik setelah lulus SMA, karena pelatihan ini sebagai bekal bagi siswa yang tidak melanjutkan kuliah atau yang langsung bekerja setelah lulus sekolah.

### **3 Aktivitas**

Aktivitas SMAN 1 Bluto Sumenep dalam mengimplementasikan Program *Double Track* dengan frekuensi yang padat karena kegiatan ini sebagai kegiatan ekstrakurikuler diluar jam pelajaran inti, sehingga siswa untuk bisa menempatkan waktunya dengan baik dan tepat, agar keterampilan yang diikuti diterima dengan baik dan memahami betul akan yang dikerjakan setelah lulus SMA dari hasil keterampilan yang diikuti masa SMA.

Aktivitas kegiatan Program *Double Track* yang diimplementasikan di SMAN 1 Bluto ini sangat padat, karena ada 4 macam keterampilan yang diikuti oleh siswa (sesuai bidangnya) sehingga dalam seminggu bisa 2 kali atau 3 kali dalam seminggu dengan jam pelajaran yang tidak sama dan juga trainer sesuai dengan bidangnya, keadaan ini membuat siswa benar-benar dipupuk untuk nantinya bisa mandiri dalam

berwirausaha mandiri setelah keluar sekolah dan secara langsung siswa bisa bekerja.

Aktivitas kegiatan *double track* yang diikuti siswa sebagai bentuk administrasi publik, adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik ((Keban, 2016: 4).

Aktivitas siswa dalam mengikuti *Double Track* dengan frekuensi yang cukup padat, agar siswa dapat memahami lebih mendalam dari keterampilan yang diikuti, sehingga nantinya siswa lulus SMA dapat bekerja secara mandiri, hal ini bagi siswa yang tidak ingin melanjutkan kuliah atau hal lainnya

Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian Atysha Pramesty Diastara (2020), menunjukkan kegiatan pengembangan siswa dalam Program *Double Track* memiliki semangat untuk mendorong tumbuhnya lulusan SMA/MA siap kerja dan juga wirausahawan baru yang berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, toleran terhadap perbedaan kultur, mendambakan keadilan, dan sangat peduli pada lingkungan. Melalui program ini diharapkan mereka yang tidak berkesempatan melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi mempunyai bekal keterampilan yang tersertifikasi yang berguna untuk menembus lowongan pekerjaan, ataupun membuka kesempatan berwirausaha dilingkungan rumah sehingga pengangguran dapat ditekan dan menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Timur yang lebih cerah dan sejahtera.

Kebijakan program *double track* merupakan kebijakan yang di

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan index pembangunan manusia dan memberikan keterampilan bagi lulusan sekolah menengah atas yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja. Menandai bahwasannya lulusan SMA di Jawa Timur setiap tahunnya meningkat. Seiring meningkatnya jumlah lulusan ternyata tidak semuanya mempunyai kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini yang menjadi permasalahan pendidikan di Jawa Timur.

Program *double track* di SMAN 1 Bluto aktivitasnya sangat padat sehingga dalam satu minggu bisa dilaksanakan 3 – 4 kali pada masing – masing keterampilan, hal ini dilakukan untuk lebih paham dan mengerti siswa akan keterampilan yang diikuti dan nantinya bisa dimanfaatkan ketika bekerja di rumah atau ditempat lainnya, sehingga siswa tidak merasa canggung karena telah mempunyai bekal dalam keterampilan.

#### **4 Karakteristik Pelaksana**

Karakteristik pelaksana Program *Double Track* di SMAN 1 Bluto telah sangat profesional dan memiliki sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikat Profesi serta mampu memberikan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga siswa menerima kegiatan keterampilan sebaik mungkin karena nantinya yang menjalankan setelah lulus sekolah, siswa sendiri.

Karakter pelaksana sebagai trainer *Double Track* yang ada di SMAN 1 Bluto telah mengikuti diklat tingkat provinsi dan mendapat sertifikat *trainer double track*, artinya mereka trainer pada 4 orang tersebut telah mendapat pelatihan penuh, artinya tidak diragukan dalam

menerapkan *double track* di SMAN 1 Bluto kepada siswa, karena nantinya program ini dibawa siswa setelah lulus dan berwirausaha mandiri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 yang menjelaskan bahwa tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi sesuai dengan bidangnya. Sehingga dengan adanya pendidik yang memiliki sertifikat keahlian menjadikan peserta didik mencapai tujuan dari program *double track*. Para trainer yang ada di SMAN 1 Bluto sebanyak 4 orang dengan masing-masing keahlian berbeda, telah mendapatkan kapasitas sangat mampu dalam memberikan pelatihan dan keterampilan kepada siswa yang mengikuti *double track*.

Karakteristik pelaksana ini sebelumnya telah dirancang untuk diikuti pelatihan yang nantinya untuk mampu dalam mengimplementasikan *double track*. Implementasi sebagai tindakan dari rencana yang sudah disusun. Implementasi menjadi hal yang penting sebagai sarana evaluasi. Implementasi merupakan suatu tindakan dalam mencapai apa yang telah ditetapkan pada suatu keputusan. Tindakan tersebut mengusahakan untuk melakukan perubahan kecil sampai terbesar sebagaimana yang diputuskan sebelumnya serta sebagai tindakan yang mengusahakan merubah keputusan menjadi suatu pola yang operasional (Apriandi, 2015 : 69).

Karakteristik pelaksana *double track* menunjukkan adanya profesionalisme dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada siswa, dan terjadi adanya keharmonisan dalam berpraktek, sehingga siswa akan lebih mengerti dan lebih memahami apa yang diberikan trainer dalam membagikan

ilmu keterampilan pada siswa, karena keterampilan ini seperti TKR akan berhadapan langsung dengan masyarakat, sehingga diperlukan adanya etika dan pelayanan yang prima.

Keadaan yang demikian sesuai dengan penelitian Andika Trirangga Putra (2021), menunjukkan evaluasi hasil belajar sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan memahami latar belakang siswa serta menemukan seberapa jauh, berkaitan dengan apa, dan bagian tujuan pendidikan mana yang sudah tercapai. Adapun, bentuk awal penilaian dari hasil belajar program *double track* dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal karena terdapat beberapa bidang keterampilan yang telah tercakup dalam mata pelajaran, sehingga nilai dari bidang keterampilan yang diikuti dalam program *double track* akan tercantum dalam rapor khususnya pada bagian keterampilan. Namun, kini tidak lagi dimasukkan ke dalam muatan lokal tetapi nilai hasil belajar akan dikeluarkan dalam bentuk ijazah formal dan sertifikat. Tidak hanya sampai pada sertifikasi saja, tetapi juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program *double track* pada masing-masing sekolah. Penyelenggaraan *double track* telah memenuhi visi, misi, dan capaian yang diharapkan.

Antusiasme yang ada pada siswa SMAN 1 Bluto merupakan salah satu sikap positif yang menunjukkan suatu rasa semangat untuk mengikuti suatu kegiatan. Selain itu juga platform integritas digunakan oleh guru, siswa, maupun penyelenggara program *double track* untuk mengelola praktik pelatihan dan mengelola proses belajar mengajar. Dengan menggunakan platform ruang *double track* peserta mampu meraih kesempatan peluang

kerja dan peluang usaha, mengembangkan diri, dan berlatih.

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan implemenetasi Program *Double Track* yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep dalam meningkatkan kompetensi siswa untuk pelatihan dan keterampilan telah terlaksana dengan tepat dan baik serta memenuhi sasaran siswa yang ikut program dengan tidak melanjutkan kuliah serta ada berkeinginan membantu orang tua dalam menambah pendapatan keluarga dan hal lain yang ada pada diri siswa dalam keluarganya.

Sistem *Double Track* merupakan sistem pembelajaran yang menggabungkan cara belajar keterampilan tambahan, hasil penelitian sebagaimana fokus penelitian terlihat sebagai berikut :

1. Standar pelatihan dan tujuan kebijakan (*Policy standars objecties*) dalam menerapkan program *Double Track* yang dilaksanakan SMAN 1 Bluto Sumenep, telah dilaksanakan secara baik dengan standar keterampilan yang ada yaitu tata boga, tata rias, tata busana dan TKR diberikan pada siswa kelas akhir dan dikhususkan bagi siswa yang tidak melanjutkan kuliah atau mau langsung kerja sendiri maupun mau membantu orang tua.
2. Sumberdaya kebijakan (*Policy Resources*) yang ada di SMAN 1 Bluto mengimplementasikan *double track* sangat baik, dimana kegiatan ini sebagai ekstrakuler selama 4 bulan penuh bagi siswa kelas akhir yang dikhususkan bagi siswa yang tidak ingin

- melanjutkan kuliah atau siswa lulus langsung bekerja sendiri, sehingga kebijakan *double track* ini disesuaikan dengan kemampuan siswa dan keahlian siswa yang nantinya siswa bisa mandiri dalam kehidupannya dalam menumbuhkan dirinya berkembang dalam berwirausaha mandiri dengan membuka butik, *service* sepeda motor maupun menjual makanan.
3. Aktivitas SMAN 1 Bluto Sumenep dalam mengimplementasikan Program *Double Track* dengan frekuensi yang padat karena kegiatan ini sebagai kegiatan ekstrakurikuler diluar jam pelajaran inti, sehingga siswa untuk bisa menempatkan waktunya dengan baik dan tepat, agar keterampilan yang diikuti diterima dengan baik dan memahami betul akan yang dikerjakan setelah lulus SMA dari hasil keterampilan yang diikuti masa SMA.
  4. Karakteristik pelaksana Program *Double Track* di SMAN 1 Bluto telah sangat profesional dan memiliki sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikat Profesi serta mampu memberikan materi pelatihan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, terutama dalam Bidang Tata Boga, Busana dan Service Kendaraan, sehingga siswa menerima kegiatan keterampilan sebaik mungkin karena nantinya yang menjalankan setelah lulus sekolah, siswa sendiri.
- Berbagai saran alternatif yang dapat diberikan pada peningkatan kualitas kerja:
1. Diharapkan standar pelatihan dan tujuan kebijakan (*Policy*

- standars objecties*) tidak hanya terpaku pada 4 keterampilan yang diberikan pada siswa kelas akhir tetapi untuk bisa ditambah sesuai dengan siswa dan sistem pengelolaannya dari SMAN 1 Bluto sendiri
2. Sumberdaya kebijakan (*Policy Resources*) mengimplementasikan *double track* tidak hanya melibatkan siswa kelas XI namun semua siswa yang mau ikut dan disesuaikan dengan kemampuan siswa dan keahlian siswa agar kegiatan ini lebih bermakna.
  3. Diharapkan aktivitas implementasikan Program *Double Track* yang dilaksanakan diluar jam pelajaran, secara langsung dimasukkan pada pelajaran khusus, atau pelajaran muatan lokal.
  4. Karakteristik pelaksana Program *Double Track* di SMAN 1 Bluto untuk lebih profesional dalam memberikan bimbingan dan keterampilan dan juga yang memberi pelajaran tidak hanya instruktur *double track* tetapi untuk bisa pihak luar untuk dapat memberikan tata cara kewirausahaan mandiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andika Trirangga Putra (2021), *Implementasi Evaluasi Hasil Belajar Pada Sekolah Dengan Program Double Track di Provinsi Jawa Timur*. [andikatrirangga@student.ub.ac.id1](mailto:andikatrirangga@student.ub.ac.id1), [maliadwi78@student.ub.ac.id2](mailto:maliadwi78@student.ub.ac.id2), [yangelsi\\_23@student.ub.ac.id3](mailto:yangelsi_23@student.ub.ac.id3),

- [adipfanani35@student.ub.ac.id](mailto:adipfanani35@student.ub.ac.id)  
4 Universitas Brawijaya,  
Malang, Jawa Timur,  
Indonesia
- Apriandi, I. (2016). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi ebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 11–35. Retrieved from
- Arikunto, Suharsimi, 2017, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
- Atysha Pramesty Diastara (2020), *Pelaksanaan Program Double Track Tata Kecantikan Pengantin Di SMAN 1 Sooko Ponorogo*. e-Jurnal, Volume 09 Nomor 2 (2020), Edisi Yudisium 02 Tahun 2020, Hal 351-358,
- Azka Maziyyah Ridhwanah (2022), *Manajemen Program Double Track dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan di SMA Negeri 1 Jenangan Kabupaten Ponorogo*. *Journal Of Islamic Education Management*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2022
- Bungin, Burhan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok : PT Raja Grafindo.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2016, *Kebijakan Publik,. Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Gramedia,
- Dwiyanto, Agus, 2017, *Reformasi Birokrasi Publik Indonesia, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Efendi, Riyanto, 2017, *Pascasarjana Pendidikan Ekonomi* , Universitas Negeri Yogyakarta *Abstrak Kinerja karyawan merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan , karena memiliki pengaruh yang besar untuk peningkatan kinerja suatu perusahaan . Kinerja karyawan*.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016, *Dasar-Dasar Dan Teori Administrasi. Publik*, Malang; Agritek Yayasan Pembangunan Nasional. Indrastuti,
- Islamy, 2017, *Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Keban, Yeremias, 2016, *Enam Dimensi Strategis Administrasi. Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Edisi Ketiga), Yogyakarta, Gava Media.
- Laurensius Arliman S (2021), *Pelaksanaan Sanksi Double Track System Bagi Siswa Diktukba Polri Polda Sumatera Barat Yang Melakukan Tindak Pidana Saat Menjadi Bintara Remaja*. *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan* Volume 8 Nomor 1 Desember 202 ISSN 2407-4233
- Maula Deniarika Alifiani, 2021, *Implementasi Kebijakan Program Double Track Di Sma Negeri 1 Tongas Kabupaten Probolinggo*, Tesis
- Naway, Fory A. 2016, *Strategi Pengelolaan Pembelajaran*. Gorontalo: Ideas Publishing,
- Nugroho, Riant, 2017, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nur Kholis (2022), *Implementasi Program Double Track Sebagai Upaya Peningkatan Keterampilan Ekonomi Kreatif Di SMA NU 1 Gresik*. *Jurnal Kependidikan Islam* Volume

- 12, Nomor 1, Tahun 2022, p-  
ISSN 2088-9305; e-ISSN  
2777-0532 hlm. 20 – 31
- Pasolong, Harbani, 2016, *Teori  
Administrasi Publik*. Bandung :  
Alfabeta.
- Ridkhwana, Azka Maziyyah, 2022  
*Manajemen Program Double  
Track dalam Meningkatkan  
Kompetensi Lulusan di SMA  
Negeri 1 Jenangan Kabupaten  
Ponorogo*, Jurnal Managemen,  
Journal Of Islamic  
Management, Volume 1  
Nomor 1 Tahun 2022
- Setiawan, Aldi, 2017, *Implementasi  
Optical Character Recognition  
(OCR) Pada  
Mesin Penerjemah Bahasa  
Indonesia Ke Bahasa Inggris*.  
Jurnal Sistem  
dan Teknologi Informasi  
(JustIN) 1.2.
- Siswanto, 2017, *Pengantar  
Manajemen*. Jakarta: Bumi  
Aksara.
- Subarsono, 2017. *Analisis Kebijakan  
Publik*. Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar,
- Sugiyono, 2017 *Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan  
R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto, 2018, *Implementasi  
Kebijakan Publik Konsep,  
Teori dan Praktik*. Pekanbaru:  
Alaf Riau
- Surmayadi, 2016, *Perencanaan,  
Implementasi dan Kebijakan  
Publik*. Penerbit Pustaka  
Cakra, Surabaya
- Syaukani. A, 2017, *Sistem Kebijakan  
Publik*. Jakarta: Ghalia  
Indonesia.
- Syafi'I, Inu Kencana, 2016, *Ilmu  
Administrasi Publik*, Jakarta:  
Rineka Cipta,
- Tangkilisan, Hesel, 2016,  
*Implementasi Kebijakan  
Publik*. Yogyakarta: Lukman  
Offset YPAPI
- Usman, Nurdin, 2016, *Konteks  
Implementasi Berbasis  
Kurikulum*, Bandung, CV  
Sinar Baru.
- Wibowo, 2017, *Manajemen Kinerja*.  
Edisi Kelima. Depok: PT. Raja  
Grafindo Persada.
- Winarno, Budi., 2016. *Teori dan  
Proses Kebijakan Publik*.  
Jakarta, Media Pressindo,